



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2021

BIRO KEUANGAN SETJEN DPR RI

2021



021 (5715717)



Gedung Sekretariat
Jenderal DPR RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto
Gelora, Jakarta 10270

KATA PENGANTAR



Gambar 1. Kepala Biro Keuangan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Biro Keuangan Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan kinerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka *good governance* dan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Keuangan merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Biro Keuangan Tahun 2021 menyajikan keberhasilan capaian sasaran strategis Biro Keuangan. Secara umum, pada tahun 2021, Biro Keuangan telah berhasil mencapai sebagian besar target indikator kinerja dengan sangat baik dengan penggunaan anggaran yang cukup efisien. Semua itu dapat terlaksana berkat kerja sama yang solid dari seluruh jajaran Biro Keuangan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Biro Keuangan atas kerja keras dan loyalitas yang tinggi, sehingga kerja kita bersama membuahkan hasil sesuai yang diharapkan.

Kami berharap Laporan Kinerja tahun 2021 ini dapat bermanfaat dalam pengukuran kinerja Biro Keuangan dan selanjutnya diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Biro Keuangan serta Sekretariat Jenderal DPR RI di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, 14 Januari 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BIRO KEUANGAN
Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>	1
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 GAMBARAN UMUM	5
1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	8
1.3 DASAR HUKUM	9
1.4 ISU STRATEGIS	10
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN	10
BAB II PERJANJIAN KINERJA	11
2.1 PERJANJIAN KINERJA	12
2.2 ALOKASI ANGGARAN	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Capaian Kinerja	15
3.2 Analisis Capaian Kinerja	16
1. Indikator Kinerja 1: Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan	16
2. Indikator Kinerja 2: Nilai Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Keuangan.....	20
3. Indikator Kinerja 3: Persentase Kesesuaian Pencatatan Transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah.....	25
4. Indikator Kinerja 4: Persentase Tata Kelola Barang Milik Negara.....	28
Indikator Kinerja 5: Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan	36
BAB IV PENUTUP.....	39
LAMPIRAN.....	41
Bagian Administrasi Keuangan	41

Bagian Administrasi BMN 42

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja	2
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2021	12
Tabel 3. Anggaran Biro Keuangan Tahun 2021	13
Tabel 4. Capaian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2021	15
Tabel 5. Persandingan Perhitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2021	18
Tabel 6. Inventarisasi Label	29
Tabel 7. Inventarisasi DBR Final	29
Tabel 8. Total Aset yang ditetapkan 2021	30
Tabel 9. Penggunaan dan Pemanfaatan BMN 2021	31
Tabel 10. Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN	32
Tabel 11. Pengawasan dan Pengendalian BMN	33
Tabel 12. Perencanaan Kebutuhan BMN	33
Tabel 13. Realisasi Anggaran Biro Keuangan Tahun 2021	37
Tabel 14. Capaian Kinerja	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kepala Biro Keuangan	i
Gambar 2. Komposisi Pegawai Biro Keuangan	6
Gambar 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Gambar 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan	7
Gambar 5. Struktur Organisasi Biro Keuangan	9
Gambar 6. Visi, Misi, dan Tujuan Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI	11
Gambar 7. Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Biro Keuangan	14
Gambar 8. Paket Meeting Pengelolaan Anggaran di Masa Transisi Perubahan Struktur Organisasi Setjen DPR RI pada Aplikasi SAKTI	24
Gambar 9. Workshop Langkah-langkah Akhir Tahun 2021	38
Gambar 10. Foto Kegiatan Bagian Administrasi Keuangan	41
Gambar 11. Pencapaian WTP DPR RI TA 2021	41
Gambar 12. Piagam Penghargaan BMN Awards 2021	42
Gambar 13. Piagam Penghargaan BMN Awards 2021	42
Gambar 14. Aplikasi SILOMPAT	43
Gambar 15. Perjanjian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2021	45

EXECUTIVE SUMMARY

Salah satu tujuan strategis Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2020-2024 adalah terwujudnya dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan sasaran kegiatan. Renstra menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan prima di bidang keuangan yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Biro Keuangan tahun 2021.

Pada awal tahun 2021, Sekretariat Jenderal DPR RI mengalami perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Nomenklatur Biro Perencanaan dan Keuangan berubah menjadi Biro Keuangan. Biro Perencanaan dan Keuangan membawahi 4 (empat) bagian, yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Administrasi Keuangan, Bagian Perjalanan, dan Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Perubahan menjadi Biro Keuangan yang membawahi 3 (tiga) Bagian, yaitu Bagian Administrasi Keuangan, Bagian Perjalanan, dan Bagian Administrasi Barang Milik Negara, di mana di masing-masing bagian terdapat perubahan struktur sub bagian.

Perubahan tersebut tidak hanya mengubah secara struktur organisasi, tetapi juga mengubah tugas dan fungsi Biro Keuangan, indikator kinerja, capaian sasaran, dan nilai anggaran. Sebelum adanya perubahan SOTK nilai anggaran semula sebesar Rp264.668.435.000. Namun, pada perjalanannya terdapat refocusing anggaran dalam rangka pemenuhan penanganan pandemi Covid-19. Hal ini diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sehingga nilai anggaran akhir sebesar Rp243.668.213.000 di mana sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 telah terealisasi sebesar Rp242.292.061.352 atau sebesar 99.44%

Laporan Kinerja Biro Keuangan Tahun 2021 merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di lingkungan Biro Keuangan termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2021. Dalam Perjanjian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2021 ditetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran program/kegiatan dan 5 (lima) indikator kinerja. Secara umum capaian sasaran program/kegiatan tersebut telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik dengan capaian indikator kinerja yang sebagian besar mencapai 100%. terdapat 4

(empat) indikator kinerja yang capaiannya di atas 100%, dan 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya kurang dari 100%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja

BIRO KEUANGAN				
Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
<i>Meningkatnya kualitas dukungan Biro Keuangan</i>	<i>Indeks Pengelolaan Keuangan</i>	91	89,01	97.81%
	<i>Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Keuangan</i>	3,40		100%
	<i>Persentase kesesuaian pencatatan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah</i>	97%	99.95%	100%
	<i>Persentase Tata Kelola Barang Milik Negara</i>	80%	87%	100%
	<i>Persentase realisasi Anggaran Biro Keuangan</i>	93%	99,44%	100%

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dalam pencapaian kinerja yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan selama tahun 2021, terdapat beberapa permasalahan yang dijelaskan secara rinci pada BAB III, antara lain:

1. Pembatasan kegiatan perkantoran karena pandemi Covid-19, sehingga terdapat kegiatan yang perlu penyesuaian dalam pelaksanaannya;
2. Perubahan tugas dan fungsi keuangan yang disebabkan oleh perubahan nomenklatur Biro Perencanaan dan Keuangan menjadi Biro Keuangan;
3. Refocusing anggaran.

Dalam rangka mengupayakan langkah strategis untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada, Biro Keuangan melakukan berikut ini:

1. Pelaksanaan kegiatan dengan media daring, baik secara full-online, maupun hybrid;
2. Penyesuaian indikator, target kinerja, serta anggaran Biro Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang baru;
3. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang tersedia setelah dilakukan refocusing, dengan mengutamakan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas.

Dengan demikian, Biro Keuangan telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan sasaran strategis disertai dengan realisasi kinerja anggaran yang sesuai dengan pencapaian kinerja.

BAB I
PENDAHULUAN

Biro Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan, pengadministrasian barang milik negara, dan administrasi perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal.

(Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021)

1.1 GAMBARAN UMUM

Pengaturan tentang kelembagaan Biro Keuangan tertuang dalam Perpres Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam Peraturan Presiden tersebut tersirat bahwa dalam struktur organisasi Setjen DPR RI, Biro Keuangan berada dibawah koordinasi Deputi Bidang Administrasi. Selanjutnya tugas dan fungsi Biro Keuangan memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan 30 Desember 2021 sebagaimana telah diterbitkan Perubahan atas peraturan tersebut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021.

Mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Biro Keuangan bertanggung jawab menyelenggarakan pengelolaan keuangan, pengadministrasian barang milik negara, dan administrasi perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal.

Dalam pelaksanaannya Biro Keuangan berkewajiban menyusun dan melakukan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Biro Keuangan, mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan perjalanan dinas, melaksanakan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan, melaksanakan pengelolaan barang milik negara, melaksanakan dukungan administrasi perjalanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal, mendukung pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional di bidang pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sebagai unit kerja pendukung kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI, maka Biro Keuangan berkewajiban memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Biro Keuangan dalam mencapai sasaran strategisnya serta mempertanggungjawabkan seluruh proses dan hasil kerja yang telah dilaksanakan. Untuk itu, Biro Keuangan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021 sebagai media pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

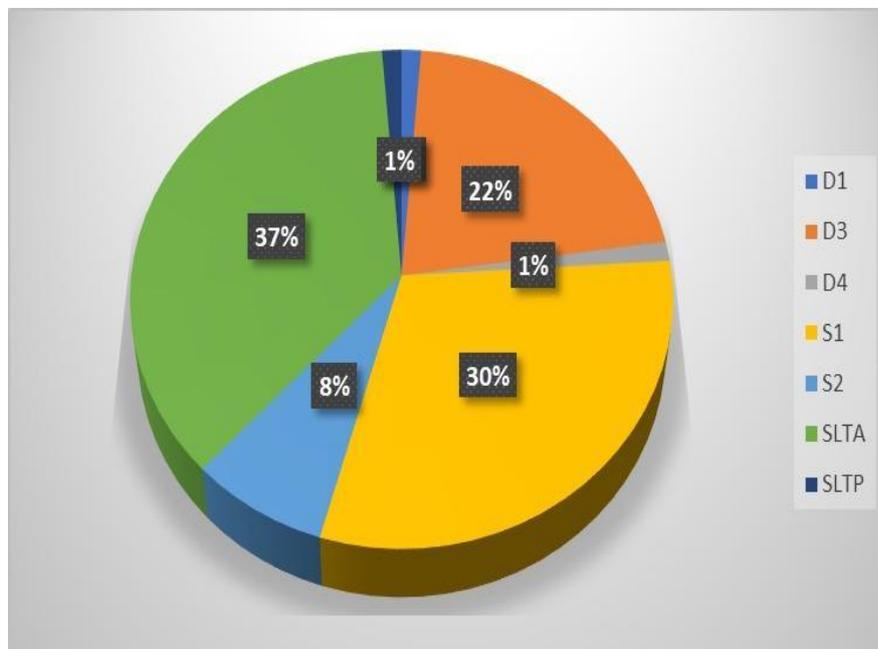
Pada tahun 2021, Biro Keuangan didukung oleh 79 pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), yang tersaji dalam gambar 1 di bawah ini.



Gambar 2. Komposisi Pegawai Biro Keuangan

Sumber: Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi ASN

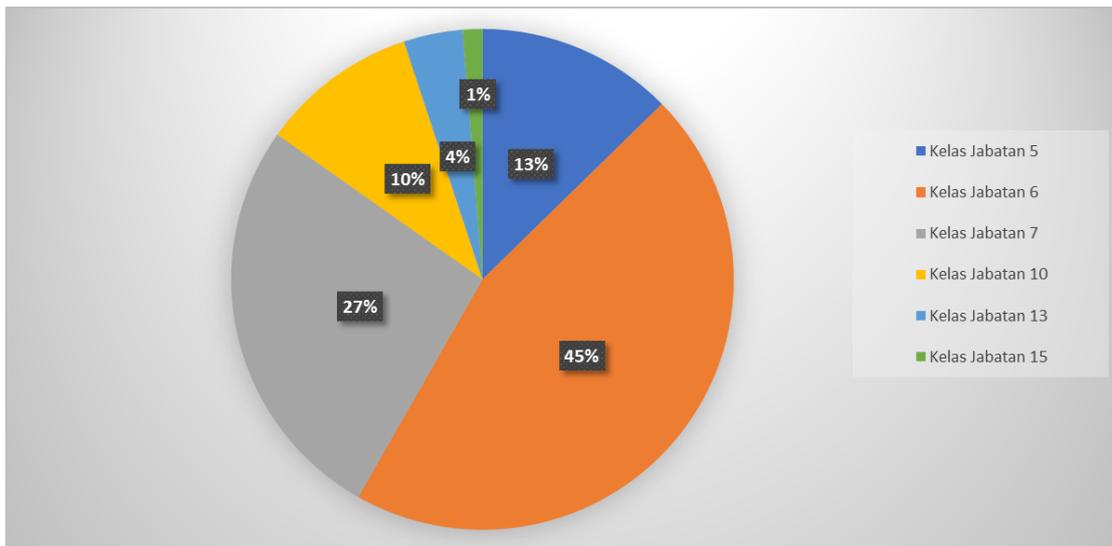
Dengan sistem organisasi yang mencakup semua fungsi tata kelola keuangan, sumber daya manusia Biro Keuangan perlu menyesuaikan diri baik sisi kualitas maupun kompetensinya. Pada tahun 2021, kualitas sumber daya manusia Biro Keuangan relatif sangat baik, tercermin dari tingkat pendidikan setara magister sebanyak 8% (6 pegawai dari 79 total pegawai), 24 orang (30%) berpendidikan Sarjana (S1), 49 orang (62%) berpendidikan D3, D1, SLTA, dan SLTP ditunjukkan pada gambar 3.



Gambar 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber: Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi ASN

Sedangkan menurut posisi jabatan, Biro Keuangan memiliki 1 orang Pejabat Eselon II (grade 15), 3 orang Pejabat Eselon III (grade 13), 8 orang Pejabat Eselon IV (grade 10), 21 pegawai dengan kelas jabatan 7, 36 pegawai dengan kelas jabatan 6, dan 10 pegawai dengan kelas jabatan 5. Secara rinci profil pegawai Biro Keuangan sebagaimana dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan

Sumber: Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi ASN

1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Keuangan senantiasa meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas secara konsisten guna memberikan pelayanan yang terbaik, menjaga penilaian kualitas akuntabilitas keuangan instansi, dan melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Biro Keuangan juga senantiasa berupaya mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang dihadapi guna menciptakan pola kerja yang efektif dan efisien.

Menurut Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Biro Keuangan memiliki tugas menyelenggarakan perencanaan program dan anggaran, pengendalian pelaksanaan anggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, serta administrasi perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam pelaksanaan tugasnya, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Biro Keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan perjalanan dinas;
- c. pelaksanaan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan;
- d. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara;
- e. pelaksanaan dukungan administrasi perjalanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal;
- f. dukungan pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional di bidang pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. penyusunan laporan kinerja Biro Keuangan; dan
- h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Administrasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Biro Keuangan didukung oleh 3 (tiga) Bagian, yaitu Bagian Administrasi Keuangan, Bagian Perjalanan, dan Bagian Administrasi Barang Milik Negara, yang tergambar dalam struktur organisasi di bawah ini.



Gambar 5. Struktur Organisasi Biro Keuangan

Sumber: Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi ASN

1.3 DASAR HUKUM

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Biro Keuangan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI;
6. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021.

1.4 ISU STRATEGIS

Dalam mewujudkan tata kelola pengelolaan anggaran dan kinerja yang baik, Biro Keuangan menghadapi beberapa tantangan yang harus dihadapi sejak awal tahun anggaran, antara lain:

1. Menjadi lembaga yang ditunjuk sebagai piloting penggunaan aplikasi SAKTI yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan;
2. Migrasi sistem pengelolaan anggaran yang berdampak pada aplikasi yang dikembangkan secara internal yang harus disesuaikan dengan Aplikasi SAKTI;
3. Perubahan SOTK yang menyebabkan perubahan tugas, fungsi, dan anggaran di unit kerja terdampak termasuk Biro Keuangan;
4. Pandemi Covid-19 yang masih berlanjut sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan-pembatasan yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan di Biro Keuangan, dan
5. Tanggungjawab untuk menjaga akuntabilitas laporan keuangan, dengan tetap memperhatikan kualitas layanan kepada Anggota Dewan.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Keuangan Tahun 2021, sebagai berikut :

1. **Pendahuluan**
Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang Biro Keuangan, uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia, potensi dan tantangan yang dihadapi, serta sistematika penyajian laporan.
2. **Perjanjian Kinerja**
Pada bagian ini dijelaskan mengenai Perjanjian Kinerja dan Alokasi Anggaran Tahun 2021.
3. **Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**
Pada bagian ini disajikan uraian pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, dan analisis akuntabilitas keuangan.
4. **Capaian Output Biro Keuangan**
5. **Penutup**

BAB II PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Biro Keuangan tahun 2021 merupakan dasar pelaksanaan kinerja biro keuangan agar pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

Perjanjian kinerja pada Biro Keuangan mengacu pada visi, misi, dan tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 6. Visi, Misi, dan Tujuan Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI

Sumber: Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI 2021-2024

2.1 PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No 53/2014, Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penugasan tersebut sebagai wujud komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang ada.

Pada tahun 2021, penetapan indikator kinerja tidak lagi hanya berorientasi pada output kegiatan, namun telah berorientasi pada outcome. Hal ini sejalan dengan masukan dan arahan dari Kemenpan bahwa kinerja dari unit Eselon II harus memberikan *impact* bagi organisasi.

Perjanjian Kinerja tahun 2021 telah ditetapkan sebagai komitmen Kepala Biro Keuangan untuk berkinerja dengan baik. Perjanjian Kinerja tersebut disampaikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2021

Sasaran	Indikator	Target
<i>Meningkatnya kualitas dukungan Biro Keuangan</i>	<i>Indeks Pengelolaan Keuangan</i>	<i>91</i>
	<i>Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Keuangan</i>	<i>3,40</i>
	<i>Persentase kesesuaian pencatatan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah</i>	<i>97%</i>
	<i>Persentase Tata Kelola Barang Milik Negara</i>	<i>80%</i>
	<i>Persentase realisasi Anggaran Biro Keuangan</i>	<i>93%</i>

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2021

2.2 ALOKASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021, Biro Keuangan mendapatkan alokasi anggaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DPR RI Tahun 2021. Alokasi anggaran Biro Keuangan pada tahun 2021 sebesar Rp243,668,213,000. Anggaran tersebut dialokasikan sebagai berikut:

Tabel 3. Anggaran Biro Keuangan Tahun 2021

No.	Bagian	Pagu
1.	Biro Keuangan	4.415.441.000
2.	Bagian Administrasi Keuangan	4.851.906.000
3.	Bagian Administrasi BMN	4.325.604.000
4.	Bagian Perjalanan	2.375.536.000
5.	Belanja Pegawai	227.717.726.000
6.	Biro Keuangan	4.415.441.000

Sumber: MONSAKTI dan Aplikasi Online Monitoring SPAN (OM-SPAN)



Gambar 7. Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Biro Keuangan

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pada tahun 2021 untuk tetap menjaga akuntabilitas, Biro Keuangan mampu menyelesaikan sebagian besar indikator kinerjanya dengan baik dan dicapai sesuai target, didukung dengan penggunaan anggaran yang efisien.

3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan target kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat sasaran program/kegiatan, indikator kinerja dengan target hasil capaian selama satu tahun.

Perjanjian Kinerja Biro Keuangan tahun 2021 mempunyai 1 (satu) sasaran program/kegiatan dan 5 (lima) indikator kinerja. Adapun rincian capaian kinerja Biro Keuangan dari masing-masing sasaran strategis terdapat pada tabel 4.

Tabel 4. Capaian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2021

Sasaran	Indikator	Target	Capaian
Meningkatnya kualitas dukungan Biro Keuangan	Indeks Pengelolaan Keuangan	91	86,93
	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Keuangan	3.40	
	Persentase kesesuaian pencatatan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah	97%	99,95%
	Persentase Tata Kelola Barang Milik Negara	80%	87%
	Persentase realisasi anggaran Biro Keuangan	93%	99,44%

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Kelima indikator kinerja tersebut mencerminkan tugas dan fungsi Biro Keuangan serta unit di bawahnya sebagai upaya menjalankan wewenangnya sebagai pengelola anggaran dengan mengedepankan prinsip pelayanan yang paripurna kepada DPR RI secara akuntabel.

Selanjutnya, dalam menjalankan fungsi koordinasi, Kepala Biro Keuangan mendistribusikan pelaksanaan indikator kinerja kepada seluruh bagian di lingkungan Biro Keuangan. Setiap Bagian di bawah jajaran Biro Keuangan menurunkan Perjanjian Kinerja Biro Keuangan menjadi Perjanjian Kinerja Eselon III yang dijabarkan menjadi lebih detil agar dapat diturunkan sampai ke level pelaksana sebagai uraian tugas yang harus terbagi habis.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dijabarkan berdasarkan indikator kinerja. Setiap indikator kinerja dilaksanakan oleh Bagian yang terkait.

Capaian realisasi sasaran kegiatan dapat diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja dengan rincian pencapaian sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja 1: Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan

Sasaran Kegiatan 1
Meningkatnya kualitas dukungan Biro Keuangan

Indikator Kinerja 1.1: Indeks Pengelolaan Keuangan

Tahun	Capaian		Prosentase Capaian
	Target	Realisasi	
2020	90	94,03	100%
2021	91	86,93	96%

Sumber: Aplikasi Online Monitoring SPAN (OM-SPAN)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L disebutkan bahwa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Penilaian IKPA mencakup 4 (empat) indikator besar, yaitu

1. Kesesuaian perencanaan dan penganggaran, diukur terhadap Jumlah revisi DIPA, akurasi rencana penarikan pada halaman III DIPA, serta kualitas pengalokasian dana pada Belanja Pegawai;
2. Efektivitas pelaksanaan kegiatan, diukur terhadap jumlah retur SP2D, kualitas penyerapan anggaran, serta ketepatan waktu dalam menyelesaikan tagihan;
3. Kepatuhan terhadap regulasi, diukur terhadap Kepatuhan terhadap regulasi antara lain terkait dengan norma waktu pengajuan data kontrak dan LPJ Bendahara, serta pengelolaan UP; dan
4. Efisiensi pelaksanaan kegiatan, diukur berdasarkan jumlah pengembalian SPM oleh KPPN dan dispensasi SPM, serta ketepatan waktu penyampaian RPD harian.

Keempat indikator besar diturunkan menjadi 12 indikator yang lebih detail sebagai berikut:

1. Jumlah revisi DIPA, yang dibandingkan dengan jumlah DIPA K/L;
2. Deviasi halaman III DIPA, yang membandingkan antara realisasi dengan halaman III DIPA;
3. Persentase pagu minus terhadap total pagu;
4. Jumlah retur SP2D, yang dibandingkan dengan jumlah SP2D terbit;
5. Persentase penyerapan anggaran, dibandingkan dengan total pagu;
6. Penyelesaian tagihan, perbandingan penyelesaian tagihan tepat waktu pada SPM non belanja pegawai;
7. Penyampaian data kontrak yang disampaikan dengan tepat waktu;
8. Jumlah pengelolaan UP, yang penyampaian SPM GUP dilakukan dengan tepat waktu;

9. Penyampaian LPJ Bendahara yang tepat waktu;
10. Dispensasi SPM, yang dibandingkan dengan seluruh SPM terbit;
11. Jumlah kesalahan SPM, yang dibandingkan dengan seluruh SPM yang diajukan;
12. Ketepatan waktu dalam penyampaian rencana kas/RPD harian sebelum tagihan diajukan ke KPPN.

Pada tahun 2020, indikator yang lebih detail ditambah menjadi 13 indikator dari semula hanya 12 indikator. Adapun tambahan indikator yang dinilai adalah indikator Capaian Output.

Berdasarkan hasil IKPA tahun 2021 yang telah dirilis resmi pada Aplikasi Online Monitoring SPAN (OM-SPAN), nilai IKPA DPR RI Tahun 2021 adalah 86,93%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat penurunan nilai IKPA. Rincian penurunan capaian IKPA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Persandingan Perhitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Indikator	2020	2021
1	Dispensasi SPM	90,00	100,00
2	Pengelolaan UP	100,00	92,00
3	Data Kontrak	81,11	35,00
4	Kesalahan SPM	90,00	95,00
5	Retur SP2D	99,91	99,83
6	Hal. III DIPA	90,57	65,51
7	Revisi DIPA	100,00	81,25
8	Kemajuan Tagihan	92,28	91,18
9	Rekon LPj	100,00	100,00
10	Realisasi	100,00	99,42
11	Renkas	97,65	90,29
12	Pagu Minus	99,98	99,95
13	Capaian Output	96,88	90,86
	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi	94,03	86,93

No.	Indikator	2020	2021
	Bobot)		

Sumber: Indikator Pelaksanaan Anggaran Tingkat K/L pada Aplikasi Online Monitoring SPAN (OM-SPAN)

Penurunan nilai capaian IKPA dari 94,03 menjadi 86,93 disebabkan oleh berikut ini:

1. Kenaikan bobot penilaian atas indikator capaian output yang semula sebesar 5% menjadi 17%,
2. Indikator Hal. III DIPA mendapatkan relaksasi penilaian pada tahun 2020, karena pandemi Covid-19. Namun di tahun 2021, relaksasi dicabut,
3. Penyampaian data kontrak ke KPPN dari masing-masing PPK melebihi batas waktu 5 (lima) hari kerja setelah penandatanganan kontrak, dan
4. Penyampaian rencana penarikan dana oleh unit kerja tidak sesuai dengan realisasi kegiatan.

Biro Keuangan telah mengupayakan kelancaran dalam pelaksanaan anggaran di masa migrasi sistem SAKTI, dan perubahan struktur organisasi dan tata kerja yang terjadi di tahun anggaran berjalan. Dengan melaksanakan koordinasi secara intensif dengan jajaran Kementerian Keuangan, Biro Keuangan dapat melaksanakan pelayanan secara optimal, dan tetap mempertahankan akuntabilitas.

2. Indikator Kinerja 2: Nilai Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Keuangan

Sasaran Kegiatan 2
Meningkatnya kualitas pelayanan Biro Keuangan

Indikator Kinerja 2.1: Indeks Pelayanan kepada Anggota DPR RI

Berpedoman pada PermenPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, perhitungan Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Keuangan dilakukan melalui survei kepada Anggota DPR RI.

Berdasarkan survei yang dilakukan pada bulan **Oktober dan November** 2021, dengan jumlah responden sebanyak **231** Anggota DPR RI. Terdapat dua unsur penilaian atas kinerja Layanan Perjalanan Dinas yaitu waktu penyelesaian dan produk spesifikasi jenis pelayanan (kualitas dan ketepatan dalam memberikan layanan). Adapun hasil survey sebagai berikut:

1. Waktu Penyelesaian

Dari **231** responden yang menyatakan sangat puas sebanyak **104** responden atau **45,02** persen dan menyatakan puas sebanyak **122** responden atau **52,81** persen. Sementara responden yang menyatakan tidak puas sebanyak **5** responden atau **2,17** persen, dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak puas. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas kecepatan Setjen dalam memberikan layanan administrasi perjalanan dinas sebesar **3,4284** dan masuk kategori "Baik".

2. Produk Spesifikasi Jenis Layanan

Dari **231** responden yang menyatakan sangat puas sebanyak **105** responden atau **45,45** persen dan menyatakan puas sebanyak **123** responden atau **53,25** persen. Sementara responden yang menyatakan tidak puas sebanyak **3** responden atau **1,30** persen, dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak puas. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas kualitas dan ketepatan Setjen dalam memberikan layanan administrasi perjalanan dinas sebesar **3,4416** dan masuk kategori "Baik".

Dengan pencapaian tersebut maka indikator kinerja keempat Biro Keuangan, yaitu Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Perjalanan Dinas dengan target sebesar **3,3** telah dapat tercapai **100%**.

Indikator indeks pelayanan kepada Anggota DPR RI ini ditopang oleh 2 (dua) bagian di Biro Keuangan, yaitu Bagian Administrasi Keuangan dan Bagian Perjalanan. Dalam meningkatkan kualitas layanan, Biro Keuangan melaksanakan inovasi yang berkelanjutan, yang menyesuaikan dengan kondisi dan tantangan yang berbeda setiap tahun. Seperti yang telah diketahui, tahun 2021 adalah tahun pertama DPR menjalankan program aplikasi SAKTI dari Kementerian Keuangan. Masa awal migrasi sistem sudah dapat dipastikan memerlukan terobosan dalam melaksanakan pelayanan, agar tidak berkurang kualitas layanan dari sebelum migrasi sistem SAKTI. Dan di tahun 2021, kebijakan seputar pandemi Covid-19 masih berlanjut. Tidak hanya harus berpikir kreatif dalam melaksanakan kegiatan, tetapi juga harus kreatif dalam pelayanan kepada Anggota DPR.

Terobosan atau inovasi yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan dalam pelayanan kepada Anggota DPR, diantaranya berikut ini:

1. Layanan Pembayaran Dana Kegiatan Anggota DPR RI

Dalam rangka menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat/konstituen di daerah pemilihan setiap anggota melaksanakan kegiatan kunjungan kerja ke daerah pemilihan yang dilaksanakan pada Masa Reses, Kunjungan Kerja diluar Masa Reses dan di luar sidang DPR RI dan Kunjungan Kerja pada Masa Reses atau Masa Sidang DPR RI. Dalam kunjungan kerja setiap anggota dapat didampingi 1 (satu) orang Tenaga Ahli Anggota. Untuk mendukung kegiatan dimaksud setiap anggota diberikan biaya perjalanan dinas dan anggaran kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang dibayar melalui transfer.

Mekanisme pembayaran dana kegiatan kunjungan kerja secara transfer merupakan ide inovasi yang dilakukan oleh Bagian Administrasi Keuangan sebagai bentuk adaptif atas kondisi terkini, termasuk kondisi darurat pandemi Covid-19, karena dapat mengurangi kerumunan di lokasi ruang kerja yang terbatas. Dan bentuk pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Untuk selanjutnya, Bagian Administrasi Keuangan sedang menyiapkan sistem layanan pembayaran dana kegiatan yang lebih aman dan tertib, diharapkan dapat mempermudah dan memberikan data valid secara *real-time*.

2. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Gaji Anggota Dewan (SIGAD)

Aplikasi SIGAD dibuat pada tahun 2012 dan digunakan pada Desember 2014 bertepatan dengan penggajian anggota baru periode 2014-2019. Lamanya pembuatan Aplikasi tersebut dikarenakan kesulitan untuk melakukan penghitungan pajak pph 21 anggota DPR RI yang tepat dan benar sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku. Aplikasi SIGAD, awalnya hanya untuk membuat daftar nominatif gaji anggota berikut slip gajinya. Seiring berjalannya waktu, Aplikasi SIGAD mulai dikembangkan sesuai dengan bertambahnya kebutuhan atas data keuangan Anggota DPR RI. Dan pada tahun 2018, mulai dibentuk tim pengembangan aplikasi karena untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi saat ini.

Setelah pengembangan yang dilakukan di tahun 2019 berupa penambahan menu untuk membuat daftar nominatif untuk 10 (sepuluh) jenis tunjangan Anggota DPR RI, penambahan menu untuk pembuatan kwitansi Dana Aspirasi Anggota yang terdiri dari Dana Aspirasi ke Dapil, Dana Aspirasi Reses, Dana Aspirasi Setahun Sekali, Dana Akomodasi, Dana Kegiatan Rumah Aspirasi, dan Dana Sosialisasi UU yang semuanya sudah dilengkapi oleh barcode. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya duplikasi dari pihak-pihak yang tidak diinginkan.

Di tahun 2021, Aplikasi SIGAD mendapatkan kesempatan untuk dikembangkan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh SAKTI agar dapat dilakukan interkoneksi aplikasi. Dengan menambahkan fitur pada proses pembuatan daftar gaji, dan penambahan data anggota, SIGAD dapat menghasilkan keluaran berupa ADK (arsip data computer) yang dapat diunggah pada SAKTI. Hal ini memudahkan proses pengajuan pembayaran gaji Anggota setiap bulannya menjadi mudah, dan sesuai dengan kebutuhan pada SAKTI. Dengan pencapaian ini, SIGAD telah berhasil menjadi aplikasi yang dibuat oleh internal organisasi menjadi terkoneksi dengan aplikasi yang berlaku nasional.

3. Tim Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi dan Pelaporan Data Pajak Penghasilan (SIALDA)

Tim Penataan dokumen anggota DPR RI dibentuk menjelang masa akhir jabatan anggota DPR RI periode 2014 -2019, dengan tujuan untuk menata dokumen anggota yang sudah berakhir masa jabatannya (inaktif) yang masih disimpan di ruang kerja Bagian Administrasi Keuangan untuk disimpan ke gudang penyimpanan yang layak agar tersusun secara sistematis. Hal ini disebabkan karena ruangan bagian administrasi keuangan sudah tidak layak dan tidak nyaman karena penuh dengan dokumen inaktif. Dokumen yang ditata adalah 1) Dokumen Gaji Anggota, Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota, 2) Dokumen Tunjangan Anggota DPR RI, 3) Dokumen Pembayaran Dana Kegiatan Anggota DPR RI ke daerah pemilihan untuk delapan kali setahun, kegiatan reses lima kali setahun dan kegiatan setahun sekali serta dokumen pembayaran jaman Sosialisasi UU DPR RI, dan 4) Dokumen KP4 Anggota DPR RI.

Tahun 2021, SIALDA ditargetkan untuk menjadi lebih mapan dan dapat menjadi titik awal terkoneksiya aplikasi pengelolaan keuangan yang dikelola oleh Bagian Administrasi Keuangan. Dalam pengembangannya, SIALDA dikuatkan untuk menjadi dapur data yang mengolah seluruh data penghasilan untuk setiap jenis stakeholder DPR. Data yang diolah ada yang berupa data online yang didapat secara otomatis oleh aplikasi pengelolaan keuangan yang telah tersedia, juga ada data penghasilan yang merupakan hasil rekapitulasi manual yang harus diimpor ke SIALDA. Sebagai dapur data, SIALDA mampu menghasilkan beragam jenis produk layanan informasi hak keuangan yang tersaji pada fitur Sistem Informasi Hak Keuangan Terintegrasi (SI-HAKI) yang tahap awalnya adalah untuk PNS Setjen DPR RI.

Penguatan dan pengembangan yang dilakukan pada SIALDA di tahun 2020 telah mencapai 100% dan menghasilkan fitur baru dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah tersedia yaitu SI-HAKI. Pencapaian ini juga menunjukkan bahwa proses integrasi aplikasi di DPR dapat dilaksanakan dan dapat memberikan manfaat yang optimal. Selanjutnya, pengembangan dapat dilakukan untuk stakeholder Anggota DPR RI dan para PPNASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.



Gambar 8. Paket Meeting Pengelolaan Anggaran di Masa Transisi Perubahan Struktur Organisasi Setjen DPR RI pada Aplikasi SAKTI

3. Indikator Kinerja 3: Persentase Kesesuaian Pencatatan Transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Sasaran Kegiatan 3
Meningkatnya akuntabilitas pencatatan transaksi di Biro Keuangan

Indikator Kinerja 3.1: Indeks akuntabilitas pencatatan transaksi

Indikator Kinerja	Capaian		Prosentase Capaian
	Target	Realisasi	
Tahun 2021: Persentase Kesesuaian Pencatatan Transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah	97%	99,95%	100%

Salah satu kriteria dalam Pemberian Opini atas Laporan Keuangan DPR RI adalah kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. DPR RI, sejak tahun 2015 telah menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual menurut PP 71 Tahun 2010. Dengan Implementasi Basis akrual tersebut, DPR RI telah menyajikan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Neraca yang komprehensif.

Salah satu kendala dalam penyusunan laporan tersebut adalah, adanya kewajiban DPR RI untuk memastikan bahwa seluruh akun belanja yang dianggarkan, digunakan sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku (Bagan Akun Standar). Hal tersebut untuk menjamin bahwa Laporan yang dihasilkan tidak mengandung salah saji material serta menghindari potensi temuan BPK.

Selama TA 2021 ini, Biro Keuangan telah melaksanakan berbagai upaya agar DPR RI dapat menyajikan laporan keuangan yang memadai dan terbebas dari salah saji material, antara lain:

1. Menjadi Peserta Piloting SAKTI dengan harapan agar pelaksanaan anggaran lebih tertib dan kesalahan akun dapat teridentifikasi sejak tahapan awal pelaksanaan anggaran
2. melaksanakan bimtek kepada seluruh staf PPK terkait penggunaan Akun dan pemilihan kode barang
3. melakukan verifikasi awal atas tagihan yang dikirimkan oleh unit kerja, terutama untuk tagihan belanja persediaan dan belanja modal
4. melakukan rekonsiliasi internal antara data keuangan dan data BMN sebagai langkah awal penemuan koreksi atas kesalahan akun yang terjadi.

Selain berbagai langkah tersebut, Biro Keuangan juga membentuk Tim Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK). PIPK adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dalam melakukan penilaian, Tim PIPK berupaya untuk memfokuskan pada akun-akun yang masih mengandung kelemahan signifikan dan mendapat temuan berulang dari BPK.

Pada tahun 2021, Tim PIPK memfokuskan penilaian atas transaksi Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin, khususnya terhadap Kesalahan Akun pada saat pengajuan belanja Barang Persediaan dan kesalahan akun pada saat pengajuan belanja Barang Modal serta melakukan penilaian atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, khususnya pada tahap kesesuaian spesifikasi teknis dan volume dalam barang dan jasa dengan hasil pengadaannya. Pemilihan kedua akun signifikan ini senada dengan alasan sebelumnya, yaitu bahwa kedua transaksi inilah yang mengandung kelemahan material dan seringkali menjadi temuan berulang oleh BPK.

Pada tahun 2021 ini, hasil reperformance yang dilakukan oleh Tim PIPK berhasil menemukan dan merekomendasikan koreksi atas potensi salah akun sebesar Rp1.759.132.250,00. Atas temuan ini, Tim PIPK telah merekomendasikan koreksi data pada modul aset, sehingga menjaga rasio kesesuaian akun pada Laporan Operasional dan Neraca pada level 100%. Untuk laporan realisasi anggaran, tidak dapat dilakukan koreksi atas belanja, sehingga rasio kesalahan akun pada LRA mencapai 0,03% atau dengan kata lain, tingkat kesesuaian dengan standar mencapai 99,97%. Dengan demikian, secara keseluruhan, Biro Keuangan berhasil menjaga kesesuaian Laporan

Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan pada tingkat 99,98% atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 97%.

Indikator Persentase Kesesuaian Pencatatan Transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan juga didasarkan pada laporan yang telah disusun oleh Bagian Administrasi Keuangan sesuai PMK 222 Tahun 2016, yaitu:

A. Laporan Keuangan Bulanan TA 2021

Laporan Keuangan Bulanan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Laporan Keuangan bulanan ini dilaksanakan setelah melalui rekonsiliasi eksternal dengan KPPN melalui aplikasi E-rekon-LK.

B. Laporan Keuangan Semester I Unaudited TA 2021

Laporan Keuangan Semester I terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Semester I disampaikan kepada Kementerian Keuangan setelah melalui Reviu oleh Inspektorat Utama selaku APIP.

C. Laporan Keuangan Triwulan III

Laporan Keuangan Triwulan III terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Triwulan III disampaikan kepada Kementerian Keuangan setelah melalui Reviu oleh Inspektorat Utama selaku APIP.

D. Laporan Tahunan Unaudited TA 2020

Laporan Keuangan TA 2020 terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan TA 2020 disampaikan kepada Kementerian Keuangan setelah melalui Reviu oleh Inspektorat Utama selaku APIP.

E. Laporan Tahunan Audited

Laporan Keuangan TA 2020 Audited terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan TA 2020 Audited disampaikan kepada Kementerian Keuangan setelah melalui Reviu oleh Inspektorat Utama selaku APIP.

4. Indikator Kinerja 4: Persentase Tata Kelola Barang Milik Negara

Sasaran Kegiatan 4
Meningkatnya tata kelola barang milik negara

Indikator Kinerja 4.1: Indeks tata kelola barang milik negara

Indikator Kinerja	Capaian		Prosentase Capaian
	Target	Realisasi	
Tahun 2021: Presentase Tata Kelola Barang Milik Negara	80%	80,88%	100%

Tata kelola Barang Milik Negara dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 sebagaimana sudah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

Perhitungan indikator kinerja berupa persentase tata kelola BMN dihasilkan dari laporan sub indikator penyusunnya sebagai berikut:

1. Laporan Pendistribusian dan Pemeliharaan

Merupakan laporan yang berisi tentang monitoring terhadap distribusi Barang Milik Negara yang diukur dengan persentase terpasangnya label untuk seluruh pengadaan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2021 di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Perhitungan pengukuran dari persentase kegiatan inventarisasi selesainya Daftar Barang Ruangan (DBR) untuk wilayah Wisma Kopo dan Gedung Nusantara I.

- a. Pelaksanaan monitoring pendistribusian BMN pada Tahun 2021 di Wisma Kopo dan Gedung Nusantara I

Pelaksanaan monitoring pendistribusian BMN pada Tahun 2021 di Wisma Kopo dan Gedung Nusantara I, telah dilakukan pendataan terhadap 11.331 item barang, dari jumlah tersebut dilakukan pelabelan terhadap 4.928 item barang. Sehingga, pelaksanaan monitoring pendistribusian BMN pada Tahun 2021 memberikan bobot sebesar **6,52%** terhadap tata kelola BMN.

Tabel 6. Inventarisasi Label

Inventarisasi Label						
PELABELAN						Bobot %
	Target Label	Barang dilabel				
Wisma Kopo	4.362	4.362				
Nusantara I	6.969	566				
Jumlah	11.331	4.928				
Persentase				43,49%		6,52%

- b. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi Daftar Barang Ruangan di Wisma Kopo dan gedung Nusantara I

Terlaksananya kegiatan inventarisasi berupa finalisasi 83 Daftar Barang Ruangan (DBR) hasil dari opname fisik pada 123 ruangan di Wisma Kopo dan Gedung Nusantara I memberikan bobot sebesar **10,12%** terhadap tata kelola BMN.

Tabel 7. Inventarisasi DBR Final

Inventarisasi DBR Final						
OPNAME FISIK						Bobot %
	Target DBR	DBR Final				
Wisma Kopo	73	73				
Nusantara I	50	10				
Jumlah	123	83				
Persentase				67,48%		10,12%

2. Laporan Penatausahaan

Laporan yang berisi tentang capaian pengukuran penggunaan BMN dalam jumlah barang yang sudah dilakukan penetapan status penggunaan, capaian realisasi PNBP dari pemanfaatan sewa BMN, capaian realisasi PNBP dari pemindahtanganan dengan cara lelang, capaian laporan pengawasan dan pengendalian dari kegiatan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan, dan terakomodirnya usulan pengadaan dan pemeliharaan RKBMN.

- a. Tercatatnya seluruh pelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Aset di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Aset yang ditetapkan oleh Pengelola Barang Milik Negara berdasarkan pendelegasian kewenangan, bahwa nilai pembelian diatas 100 juta ditetapkan status penggunaannya oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini diwakilkan oleh KPKNL Jakarta I sejumlah 2.380 NUP, sedangkan aset BMN yang ditetapkan oleh Pengguna BMN dalam hal ini Sekjen DPR RI sejumlah 53.739 NUP dengan total keseluruhan Total Barang yang ditetapkan tahun 2021 sejumlah 56.119 NUP, dan dapat digambarkan pada diagram tabel di bawah ini:

Tabel 8. Total Aset yang ditetapkan 2021

No.	Keterangan	Jumlah
1	Aset ditetapkan oleh pengelola	2.380
2	Aset ditetapkan oleh pengguna	53.739
Total Aset yang ditetapkan 2021		56.119

Penetapan Status Penggunaan BMN telah dilaksanakan terhadap 56.119 item barang dimana 44.609 item barang diperoleh pada Tahun 2021. Sehingga, penetapan status penggunaan yang telah dilaksanakan memberikan bobot sebesar 6,29% terhadap tata kelola BMN. Pada pelaksanaan pemanfaatan telah diterima PNBP sebesar Rp5.300.691.813,- dari target PNBP Tahun 2021 sebesar Rp6.898.375.000,-. Sehingga pemanfaatan BMN memberikan bobot sebesar 3,85% terhadap tata Kelola BMN. Total kontribusi terhadap tata kelola BMN dari Penetapan status penggunaan dan pemanfaatan BMN ialah sebesar **10,00%**.

Tabel 9. Penggunaan dan Pemanfaatan BMN 2021

Penggunaan dan Pemanfaatan						
PENGUNAAN						Bobot %
	Total Barang (Pembelian dan Penyelesaian KDP)	BMN yang sudah dilakukan PSP				
Semester II Tahun 2020	38.292					
Semester I Tahun 2021	6.317					
Jumlah	44.609	56.119				
Persentase			125,80%	6,29%		
PEMANFAATAN						
	Target PNBP 2021	PNBP 2021				
PNBP dari Pemanfaatan	Rp 6.898.375.000,00	Rp 5.300.691.813,00				
Persentase			76,84%	3,84%		
Total Persentase				10,13%		10,00%
*Note: melebihi target Laporan Penggunaan & Pemanfaatan yaitu 10,13% sehingga dihitung 10% kontribusi bobot						

Penetapan status penggunaannya merupakan proses awal dari kegiatan pengelolaan aset BMN yang tentunya dalam melaksanakan pemeliharaan dan rencana kebutuhan kedepannya akan lebih penting dan perlu dilakukan manajemen yang baik. Hal itu dilakukan guna menjaga aset yang telah di beli dengan menggunakan Anggaran Negara agar aset tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam menunjang pelayanan Sekretariat Jenderal DPR RI kepada DPR RI.

Kegiatan Pemanfaatan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2021 yang telah dilakukan oleh Bagian Administrasi BMN memperoleh hasil PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dalam rangka perpanjangan sewa serta perubahan tarif sewa yang disesuaikan dengan tarif sewa dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp5.315.919.338,- (Lima Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) dengan pihak penyewa sebagai berikut:

1. PT Pos Indonesia
2. PT Bank Mandiri Persero Tbk
3. PT XL Antena GSM
4. Yayasan Bina Serbaguna Baiturrahman
5. PT Indonesia Satellite Corporation Tbk
6. Dharma Wanita Persatuan Sekretariat jenderal DPR RI
7. PT Bank Central Asia
8. Koperasi Pegawai Sekretariat jenderal DPR RI
9. D'Executive
10. PT Pasopati Mobilindo

11. PT Bank Negara Indonesia
 12. PT Telekomunikasi Seluler
 13. PT Jawa Tengah Citra Boga
 14. Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal MPR RI
 15. PT Pasopati Mobilindo
- b. Pelaksanaan pemindahtanganan berupa penghapusan BMN dengan cara lelang

Tim Pelaksanaan Penghapusan dan Pelelangan pada T.A. 2021 telah melakukan inventarisasi dan pendataan BMN yang akan dihapuskan sejumlah 16.1818 NUP dari unit-unit kerja berikut:

- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan
- Bagian Pengelolaan Wisma
- Bagian Gedung & Instalasi
- Bagian Kendaraan

Pelaksanaan pemindahtanganan berupa penghapusan BMN dengan cara lelang telah memberikan kontribusi terhadap PNBPN dengan jumlah Rp1.899.550.241,-, dari target PNBPN Pemindahtanganan Tahun 2021 sebesar Rp50.000.000,-. Sehingga pemindahtanganan telah memberikan kontribusi sebesar 10,00% terhadap tata kelola BMN.

Tabel 10. Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN

Penghapusan dan Pemindahtanganan						
PEMINDAHTANGANAN						Bobot %
PNBP dari Pemindahtanganan	Target PNBPN 2021	PNBP 2021				
Rp	50.000.000,00	Rp	1.899.550.241,00			
Persentase				3799,10%	379,91%	10,00%
*Note: melebihi target PNBPN yaitu 379,91% sehingga dihitung 10% kontribusi bobot						

- c. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian kegiatan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 Tahun 2012 Bab III Tentang Pengawasan dan Pengendalian Oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yaitu Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian dilakukan terhadap Barang Milik Negara, diantaranya yaitu telah melakukan pemantauan dan

penertiban atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN yang berada dalam penguasaannya.

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN berupa Penetapan Status Penggunaan terhadap 56.119 item barang, Pemanfaatan dengan kontribusi

Tabel 11. Pengawasan dan Pengendalian BMN

PENGGUNAAN				Bobot %	
	Total Barang (Pembelian dan Penyelesaian KDP)	BMN yang sudah dilakukan PSP			
Semester II Tahun 2020	38.292				
Semester I Tahun 2021	6.317				
	44.609	56.119			
Persentase			125,80%	3,33%	
PEMANFAATAN					
	Target PNPB 2021	PNBP 2021			
PNBP dari Pemanfaatan	Rp 6.898.375.000,00	Rp 5.315.919.338,00			
Persentase			77,06%	2,57%	
PEMINDAHTANGANAN					
	Target PNPB 2021	PNBP 2021			
PNBP dari Pemindahtanganan	Rp 50.000.000,00	Rp 1.899.550.241,00			
Persentase			3799,10%	3,33%	
Total Persentase				9,24%	9,24%

pada PNPB sebesar Rp5.315.919.338,- dan pemindahtanganan dengan kontribusi pada PNPB sebesar Rp1.899.550.241,- yang telah dilakukan pada Tahun 2021 memberikan kontribusi 9,24% terhadap tata kelola BMN

d. Perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara.

Perencanaan kebutuhan barang milik negara, diusulkan pemeliharaan terhadap 1.721 item barang dengan seluruhnya disetujui oleh DJKN untuk dilakukan pemeliharaan. Sementara pada Kegiatan Pengadaan diusulkan untuk pengadaan 10 unit motor. Namun, usulan pengadaan tersebut tidak disetujui. Sehingga perencanaan kebutuhan barang milik negara memberikan kontribusi sebesar 5% terhadap tata kelola BMN.

Tabel 12. Perencanaan Kebutuhan BMN

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara					
RKBMN 2023					Bobot %
	Usulan	Persetujuan			
Pemeliharaan	1721	1721			
Presentase			100,00%	5,00%	
Pengadaan	10	0			
Presentase			0,00%	0,00%	
Total Persentase				5,00%	5,00%

3. Laporan Barang Milik Negara

Pelaporan BMN bertujuan untuk menyajikan kewajaran nilai aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam rangka manajemen pengelolaan BMN dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Standar yang digunakan dalam penyusunan laporan BMN adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Pemerintah dan PMK tentang pengelolaan BMN.

Indikator ini dihitung berdasarkan target jumlah Laporan Barang Milik Negara (9 Laporan) dikali dengan besarnya bobot sebesar 0.3. Dikarenakan keseluruhan laporan berhasil disusun baik tingkat satker maupun lembaga maka realisasi capaian adalah 100% dan menyumbang keseluruhan persentase tata kelola sebesar 30% ($100\% \times 0.3$) Jenis laporan Barang Milik Negara yang disusun oleh Biro Keuangan yang terdiri dari :

- a. Laporan Barang Kuasa Pengguna (Tingkat Satuan Kerja) merupakan gabungan dari laporan satuan kerja Sekretariat Jenderal dan satuan kerja Dewan yang terdiri dari 3 laporan (Semester I Tahun 2021, Semester II Tahun 2020 dan Tahunan Tahun 2020);
- b. Laporan Barang Pengguna (Tingkat Lembaga) merupakan laporan instansi atau merupakan penggabungan dari seluruh satuan kerja yang ada di lingkungan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terdiri dari 3 laporan (Semester I Tahun 2021, Semester II Tahun 2020 dan Tahunan Tahun 2020)

Bagian Administrasi BMN selaku penanggung jawab kegiatan pelaksanaan Pendistribusian dan Pemeliharaan, Penatausahaan serta Pelaporan BMN pada Tahun 2021 memberikan nilai 80.88% untuk tata kelola BMN. Nilai tersebut telah melebihi target tata kelola BMN pada Tahun 2021 yaitu sebesar 80%.

Dalam rangka mendukung capaian kinerja indikator Persentase Tata Kelola Barang Milik Negara, Bagian Administrasi Barang Milik Negara membentuk beberapa tim diantaranya:

- a. Tim Pelaksanaan Penghapusan BMN
- b. Tim Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)

Tercapainya target tata kelola barang milik negara tidak terlepas dengan adanya dukungan dari Biro Keuangan serta unit kerja pengelola Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Meskipun telah memenuhi target, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi selama tahun 2021 dalam upaya pencapaian target tersebut, antara lain:

- a. Adanya Pandemi Covid-19, sehingga kegiatan-kegiatan sosialisasi aturan maupun kebijakan seputar pengelolaan Barang Milik Negara bersifat koordinasi dengan media daring yang sifatnya terbatas;
- b. Keterbatasan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan inventarisasi dan pelabelan jika dibandingkan dengan jumlah pengadaan barang dan jasa serta luas wilayah penyebaran BMN;
- c. Keberadaan dan kondisi BMN di lapangan masih menjadi permasalahan dalam penyajian BMN di Laporan, hal ini disebabkan proses inventarisasi selama tahun 2021 dilakukan secara terbatas, dikarenakan unit kerja masih membatasi interaksi dengan bagian lain;
- d. Dengan menjadi piloting SAKTI di tahun 2021, banyak hal-hal baru yang harus dipelajari dan proses adaptasi terhadap perubahan tersebut harus cepat dilakukan.

Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang ada, telah dilakukan langkah antisipasi agar target kinerja dapat tercapai, antara lain:

- a. Pada tahun anggaran 2022, Biro Keuangan telah mengalokasikan anggaran kegiatan inventarisasi BMN dengan melibatkan pihak ketiga sehingga diharapkan dapat meringankan beban kerja teman-teman di pengelolaan BMN;
- b. Biro Keuangan rutin mengadakan konsultasi dan meminta saran serta pendampingan kepada pihak Kementerian Keuangan terkait implementasi SAKTI sehingga dapat menunjang ketepatan dan kecepatan pencatatan dan pelaporan Barang Milik Negara.

Strategi yang dilakukan kedepannya untuk terus mempertahankan kinerja dalam rangka tercapainya target tata kelola BMN yang disusun antara lain:

- a. Mempersiapkan kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;;
- b. Selalu mengedepankan continuous improvement di seluruh lini pengelolaan Barang Milik Negara sehingga dapat mendukung untuk menghasilkan tata kelola yang lebih cepat, tepat dan akurat.

Indikator Kinerja 5: Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan

Sasaran Kegiatan 5

Tercapainya target penyerapan anggaran secara optimal di Biro Keuangan

Indikator Kinerja 5.1: Indeks penyerapan anggaran

Indikator Kinerja	Capaian		Prosentase Capaian
	Target	Realisasi	
Tahun 2021: Persentase penyerapan anggaran Biro Keuangan	93%	99.44%	100%

Sumber: MONSAKTI dan Aplikasi Online Monitoring SPAN (OM-SPAN)

Pada tahun 2021, terdapat indikator kinerja terkait dengan pengelolaan anggaran. Indikator tersebut adalah Persentase penyerapan anggaran Biro Keuangan.

Biro Keuangan mengelola pagu anggaran sebesar Rp243.668.213.000 Pada tahun 2021, Biro Keuangan dapat merealisasikan anggaran sebagai pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Biro Keuangan sebesar Rp242.292.061.352 atau 99.44% dari pagu.

Dengan pencapaian tersebut maka indikator kinerja kelima Biro Keuangan, yaitu Persentase penyerapan anggaran Biro Keuangan dengan target sebesar 93% telah dapat tercapai 100%.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Biro Keuangan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp243.668.213.000. Pagu anggaran yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp242.292.061.352 atau 99,44% dari pagu. Rincian realisasi anggaran Biro Keuangan tahun 2021 ditunjukkan pada tabel 13.

Tabel 13. Realisasi Anggaran Biro Keuangan Tahun 2021

BIRO KEUANGAN			
Bagian	Pagu	Realisasi	%
Biro Keuangan	4.415.441.000	4.124.790.280	93.44
Bagian Administrasi Keuangan	4.851.906.000	4.816.264.600	99.27
Bagian Administrasi BMN	4.325.604.000	4.309.373.494	99.62
Bagian Perjalanan	2.375.536.000	2.255.900.750	95.69
Belanja Pegawai	227.717.726.000	226.784.732.228	99.59
Total	243.668.213.000	242.292.061.352	99.44

Sumber: MONSAKTI dan Aplikasi Online Monitoring SPAN (OM-SPAN)

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa, realisasi anggaran yang tidak dapat terserap secara optimal berasal dari Biro Keuangan dan Bagian Perjalanan yaitu sebesar 93.44% dan 95.69%. Namun demikian, secara keseluruhan capaian kinerja anggaran dapat terserap di atas 99%. Hal ini berbanding lurus dengan capaian kinerja output di seluruh unit Biro Keuangan yang dapat menyelesaikan seluruh capaian output yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021.

Realisasi anggaran Biro Keuangan tercermin dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan dan 3 (tiga) bagian yang berada di bawah Biro Keuangan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian, terdiri dari kegiatan rutin dan non rutin. Kegiatan rutin adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya. Dan kegiatan non-rutin adalah kegiatan yang sifatnya kreativitas Bagian untuk menjawab tantangan yang berbeda setiap tahun, untuk mendukung Biro Keuangan dalam mengatasi isu strategis.

Pada tahun 2021, Biro Keuangan mampu menyelesaikan sebagian besar target pada tiap indikator kinerja. Dari sisi anggaran, Biro Keuangan telah mampu menggunakan anggarannya dengan efisien dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Realisasi anggaran sebesar 99.44% selaras dengan capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini menunjukkan capaian penyerapan anggaran yang baik pada tahun 2021.

Dengan demikian, Biro Keuangan telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta dibarengi dengan realisasi kinerja anggaran yang sesuai dengan pencapaian kinerja.



Gambar 9. Workshop Langkah-langkah Akhir Tahun 2021

BAB IV
PENUTUP

“datang bersama adalah awal, tetap bersama adalah kemajuan, bekerja bersama adalah kesuksesan” -Henry ford

“sendiri-sendiri kita bisa melakukan begitu sedikit, bersama-sama kita bisa melakukan begitu banyak” -Hellen keller

Pada tahun anggaran 2021, Biro Keuangan telah mewujudkan kinerjanya melalui pelaksanaan 1 (satu) sasaran kegiatan dan 5 (lima) indikator kinerja kegiatan. Dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Tabel 14. Capaian Kinerja

BIRO KEUANGAN				
Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
<i>Meningkatnya kualitas dukungan Biro Keuangan</i>	<i>Indeks Pengelolaan Keuangan</i>	91	89,01	97.81%
	<i>Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Keuangan</i>	3,40		100%
	<i>Persentase kesesuaian pencatatan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah</i>	97%	99,95%	100%
	<i>Persentase Tata Kelola Barang Milik Negara</i>	80%	87%	100%
	<i>Persentase realisasi Anggaran Biro Keuangan</i>	93%	99,44%	100%

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Keberhasilan Biro Keuangan dalam mengelola anggaran tahun 2021 ditandai dengan adanya penghargaan yang diterima Biro Keuangan, diantaranya:

1. BMN Awards 2021

Pada Bulan November 2021 Administrasi BMN memperoleh Juara II dalam acara BMN Awards 2021 dengan Kategori “Continuous Improvement” (untuk mengapresiasi terhadap K/L yang telah melakukan upaya-upaya secara optimal sehingga dapat tercapai peningkatan kinerja yang progresif dan signifikan dalam pengelolaan BMN melalui penggunaan teknologi informasi) yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan c.q. DJKN. Continuous

Improvement ini diperoleh atas Penggunaan Aplikasi Si-Lompat (Sistem Informasi Laporan Opname Fisik Yang Terintegrasi dan Up to Date) dimana informasi yang tersaji dapat menjadi dasar Laporan BMN yang profesional, akuntabel dan tepat waktu

2. Penghargaan atas keberhasilan menyusun Laporan Keuangan tahun 2020 dengan Capaian WTP yang merupakan pencapaian WTP ke 11 kali. Atas pencapaian ini, DPR RI telah berhasil memperoleh WTP Silver yang merupakan pencapaian WTP 10 kali berturut turut.

Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan Biro Keuangan untuk terus meningkatkan dan mempertahankan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan berbagai cara dalam pelaksanaan kegiatan, melalui media daring, hybrid, dan offline saat kebijakan terkait pandemi Covid-19 telah diperbolehkan;
2. mengoptimalkan sumber daya manusia di Biro Keuangan dengan memberikan kesempatan untuk peningkatan kapasitas, dan berkarya sesuai dengan kemampuan optimalnya;
3. melakukan evaluasi target dan pencapaian kinerja secara berkala;
4. pengembangan aplikasi yang mendukung tugas dan fungsi Biro Keuangan dalam melaksanakan pelayanannya.

LAMPIRAN

Bagian Administrasi Keuangan



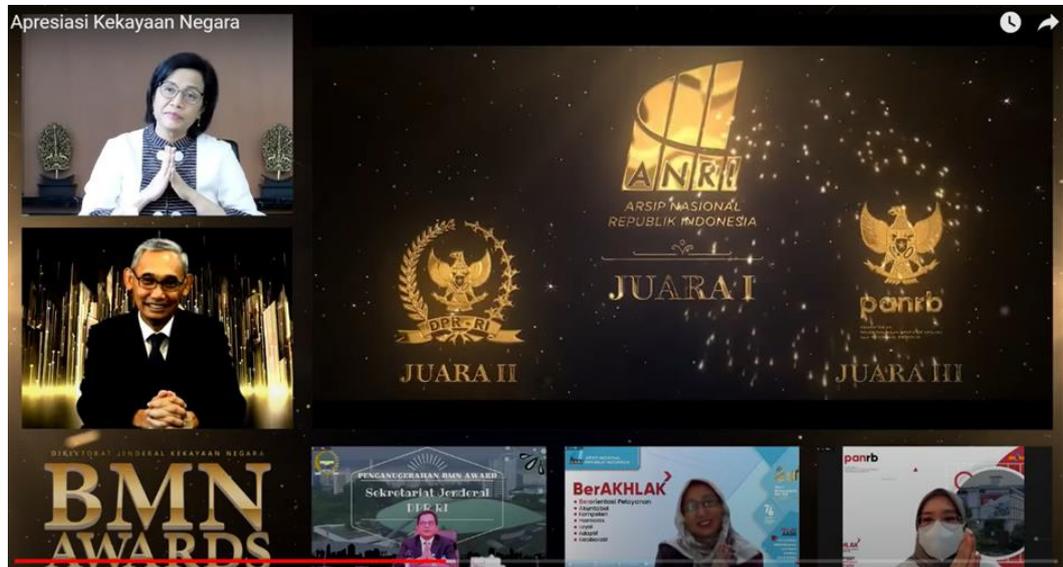
Gambar 10. Foto Kegiatan Bagian Administrasi Keuangan



Gambar 11. Pencapaian WTP DPR RI TA 2021

Bagian Administrasi BMN

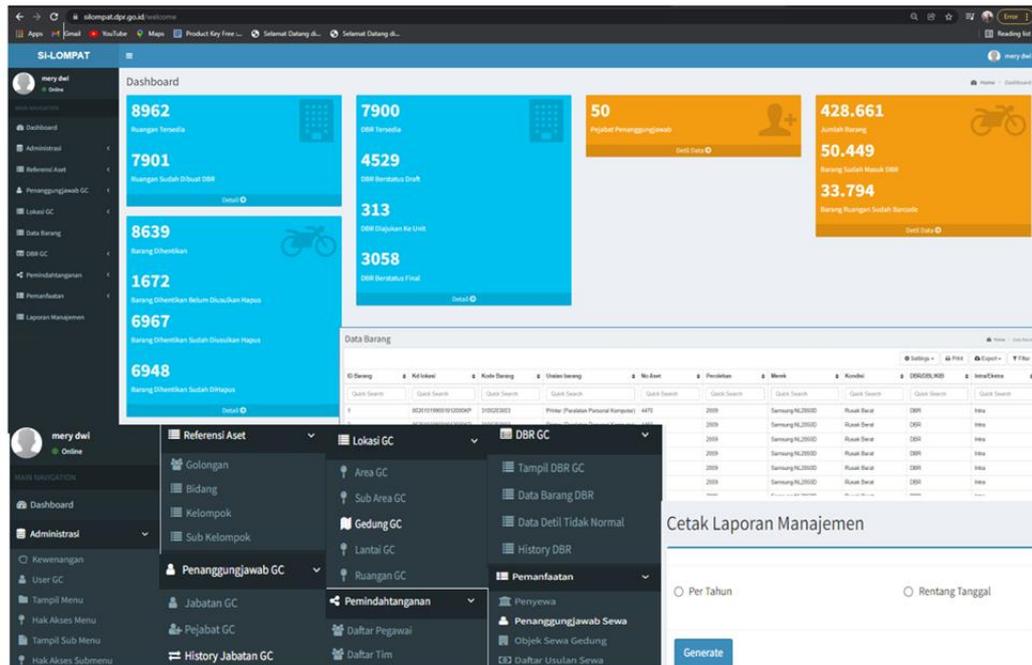
- BMN Awards 2021



Gambar 12. Piagam Penghargaan BMN Awards 2021



Gambar 13. Piagam Penghargaan BMN Awards 2021



Gambar 14. Aplikasi SILOMPAT

Pada Bulan November 2021 Administrasi BMN memperoleh Juara II dalam acara BMN Awards 2021 dengan Kategori “Continuous Improvement” (untuk mengapresiasi terhadap K/L yang telah melakukan upaya-upaya secara optimal sehingga dapat tercapai peningkatan kinerja yang progresif dan signifikan dalam pengelolaan BMN melalui penggunaan teknologi informasi) yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan c.q. DJKN. Continuous Improvement ini diperoleh atas Penggunaan Aplikasi Si-Lompat (Sistem Informasi Laporan Opname Fisik Yang Terintegrasi dan Up to Date) dimana informasi yang tersaji dapat menjadi dasar Laporan BMN yang profesional, akuntabel dan tepat waktu karena aplikasi ini memiliki beberapa keunggulan diantaranya yaitu:

- Sinkronisasi Data
- Rekonsiliasi
- Cetak Label
- Mutasi Barang
- Monitoring dan Evaluasi
- Akuntabel
- Tracing Operator
- Mutasi Penanggungjawab

Selain itu Aplikasi Si-Lompat ini juga memiliki banyak menu yang dapat digunakan untuk membantu tugas pokok Administrasi BMN dalam melakukan pengelolaan BMN sebagai berikut:

- Dashboard
Berisi tentang progres pekerjaan pokok dalam pengelolaan BMN
- Lokasi Barang
Berisi tentang informasi lokasi BMN
- Data Barang
Berisi tentang klasifikasi BMN
- DBR
Berisi tentang Daftar Barang Ruangan
- Laporan Manajemen
Berisi tentang Resume progress pekerjaan secara periodik



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Biro Keuangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si.
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Administrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jakarta, 30 Juli 2021
Pihak Pertama,

Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si.
NIP. 19650705 199103 1 003

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 196902 3 199302 1 001

Gambar 15. Perjanjian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

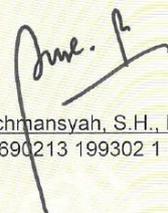
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Biro keuangan	1.	Indeks Pengelolaan Keuangan	91
		2.	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Keuangan	3,40
		3.	Persentase kesesuaian pencatatan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah	97%
		4.	Persentase Tata Kelola Barang Milik Negara	80%
		5.	Persentase realisasi anggaran Biro Keuangan	93%

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 265.222.214.000,-

Plt. Deputi Bidang Administrasi,


Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si.
 NIP. 19650705 199103 1 003

Jakarta, 30 Juli 2021
 Kepala Biro Keuangan,


Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
 NIP. 19690213 199302 1 001





2021